



**EFEK MODERASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGARUH PENGELUARAN  
PEMERINTAH TERHADAP INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA  
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA  
SE-PROVINSI BANTEN)**

**Rita Rosiana**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
*rosiana\_rita@yahoo.com*

**Agus Sholikhhan Yulianto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
*rosiana\_rita@yahoo.com*

**Nurhayati Soleha**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
*rosiana\_rita@yahoo.com*

**Abstract**

*This research was aimed to analyze the moderating effect of the internal control weakness on the impact of government expenditure on human development index. Human resources quality was considered as the important factor for the growth of a region. The optimally government expenditure could give positive impact on the human resource quality. Otherwise the ineffective government expenditure was expected to give negative impact on human resources development. This research was conducted over the financial data released by the municipal government in Banten Province for the period of 2009-2012. The analysis shows that government expenditure influences the human development index. The weakness of internal control does not show the moderating effect over the influence of government expenditure on human development index.*

**Keywords: Human development index, Internal Control and Government Expenditure**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moderasi dari kelemahan pengendalian internal terhadap dampak pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia. Kualitas sumber daya manusia dianggap sebagai faktor penting untuk pertumbuhan suatu daerah. Pengeluaran pemerintah yang optimal dapat memberikan dampak positif pada kualitas sumber daya manusia. Kalau tidak, pengeluaran pemerintah yang tidak efektif diperkirakan akan berdampak negatif terhadap pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan atas data keuangan yang dirilis oleh pemerintah kota di Provinsi Banten untuk periode 2009-2012. Analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Kelemahan pengendalian internal tidak menunjukkan efek moderasi atas pengaruh pengeluaran pemerintah pada indeks pembangunan manusia.

**Kata Kunci: Indeks pembangunan manusia, Kontrol Internal, dan Pengeluaran Pemerintah**

**PENDAHULUAN**

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Sumber daya manusia telah diakui secara global sebagai faktor utama yang

bertanggung jawab bagi kemakmuran suatu bangsa (Oluwatubi & Ogunrinola, 2011). Khalifa & Al-Yousif (2008) menyebutkan pentingnya modal sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dalam beberapa saluran sebagai berikut. Pertama dengan meningkatkan investasi pada faktor produksi ini melalui pendidikan maka suatu masyarakat akan dapat meningkatkan pertumbuhannya. Saluran kedua bahwa modal sumber daya manusia mendorong terjadinya penciptaan ketidak seimbangan (penciptaan *economic of scale* yang menyebabkan pertumbuhan output melebihi input) dalam masyarakat yang selanjutnya akan memaksakan penyesuaian agar terjadi keseimbangan yang baru. Saluran ketiga bahwa modal sumber daya manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena tenaga kerja yang terdidik dapat memberikan pengaruh positif pada produktifitasnya.

Khalifa & Al-Yousif (2008) menunjukkan bahwa pola keterkaitan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terjadi dalam pola dua arah. Pendidikan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dan semakin tinggi kemakmuran suatu masyarakat maka semakin tinggi pula permintaan akan layanan pendidikan. Temuan ini menyangkal penjelasan literatur yang cenderung menyatakan bahwa pola hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi dengan pola satu arah dimana pendidikan sebagai variabel bebas dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. Bukti penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan itu sendiri akan meningkat manakala masyarakat mempunyai akses yang cukup yang didukung oleh kekuatan finansial yang memadai untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pentingnya peranan sumber daya manusia bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat tersebut mengisyaratkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia baik oleh masyarakat secara mandiri maupun oleh pemerintah. Masyarakat dapat menjalankan proses pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai instrument dan institusi pendidikan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Proses ini dapat berjalan dengan baik tanpa campur tangan pemerintah manakala persaingan bersifat sempurna ketika semua pihak mempunyai informasi dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan akses menuju proses pengembangan tersebut. Akan tetapi dalam realitas kondisi persaingan yang sempurna sulit untuk terwujud sehingga peran pemerintah menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menciptakan kesimbangan antar anggota masyarakat dalam memperoleh akses pengembangan (pendidikan) yang memadai. Peran pemerintah ini menjadi sangat vital terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat penghasilan marjinal yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

Campur tangan pemerintah dalam sebuah lingkungan politik demokratis adalah hasil konsensus dari berbagai kekuatan politik dan pemangku kepentingan yang berpengaruh. Teorema geometri politik Coase menunjukkan bahwa tawar-menawar politik menghasilkan hasil kebijakan yang unik yang dalam kondisi umumnya masuk akal, bahkan dalam pengaturan yang lain akan ditandai dengan preferensi-preferensi tanpa kelengkapan (Parisi, 2003). Teori regulasi ekonomi Stigler (1969) dengan tegas menyatakan bahwa regulasi dijelaskan sebagai hasil dari kekuatan permintaan dan penawaran. Kekuatan-kekuatan tersebut memegang peranan penting dalam penentuan kebijakan strategi pemerintah termasuk dalam politik anggaran.

Penentuan anggaran sebagai sebuah aktifitas politik pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum. Akan tetapi dengan adanya tarik ulur kepentingan antar berbagai kelompok politik dan elemen masyarakat maka tujuan semula tersebut dapat

berubah menjadi pelayanan pada kepentingan kelompok tertentu. Distorsi dalam penyusunan anggaran terjadi karena pengaruh kekuatan-kekuatan politik tertentu yang tidak selalu mengutamakan kepentingan public secara luas. Selain itu dengan system pengawasan yang lemah maka penyusunan anggaran justru semakin terdistorsi pada kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan manfaat yang maksimal dan cenderung mengarah pada pemborosan anggaran.

Distorsi yang terjadi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran telah menjadi keprihatinan dalam tata kelola keuangan negara. Perilaku menyimpang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran berdampak pada tidak tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal, tidak terjadi pemerataan distribusi pendapatan dan biaya hidup yang semakin tinggi.

Oleh karena itu besarnya pengeluaran pemerintah tidak selalu mencerminkan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang besar sekalipun akan menjadi sia-sia jika ditujukan untuk kegiatan yang tidak mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan urutan skala prioritas yang paling penting. Terlebih lagi jika pelaksanaan anggaran tidak dilakukan dengan disertai pengendalian intern yang efektif. Potensi kerawanan yang mungkin sekali terjadi adalah penyelewengan keuangan negara melalui tindak kejahatan korupsi.

Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Priyo Hari Adi, 2009). Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan manusia tersebut dapat diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Besarnya angka indeks tersebut, secara simultan perlu diteliti beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap naik turunnya IPM (Nur Isa Pratowo, 2009). Apabila IPM-nya mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

Berdasarkan profil kemiskinan di Provinsi Banten jumlah penduduk miskin pada Maret 2013 mencapai 656.243 orang (5,74%), meningkat 7.989 orang (8,00%) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 648.254 orang (5,71 %), hal ini menunjukkan IPM Provinsi Banten menurun, atau tidak terealisasi dari target yang ditentukan, untuk itu pemerintah sendiri harus lebih memperhatikan segala aspek yang bisa membuat tingkat IPM Provinsi Banten kembali meningkat, contohnya dari sisi Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) (BPS, 2013).

GKMB adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, karena IPM sendiri diukur dari tingkat taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity Index* (PPP). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik.

**Masukkan tabel 1.1. disini**

Masukkan tabel 1.2. disini

## LANDASAN TEORI

### Teori Keuangan Publik

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa kebijakan pemerintah pada mulanya ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat *bonafide* namun pada tahap selanjutnya dapat terjadi kesalahan pengelolaan sehingga sasaran yang semula telah ditetapkan dapat menjadi bias dan pencapaian menjadi tidak maksimal. Peran pemerintah dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat merupakan inti dari rumusan berbagai teori-teori sosial. Richard Musgrave mengungkapkan kebijakan ekonomi publik mempunyai tiga sasaran dasar (Oates, 1968), yaitu : (1) melakukan alokasi sumber daya secara efisien; (2) mendapatkan distribusi pendapatan dan kemakmuran; (3) menjaga stabilitas produksi dan tenaga kerja.

Posner (1974) menjelaskan mengenai teori regulasi ekonomi dan menerangkan bahwa bahwa campur tangan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui penerbitan suatu regulasi mengenai kebijakan pengendalian harga, tarif dan segi ekonomi lainnya. Politik dalam penentuan anggaran dapat dikatakan sebagai proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada model rasionalitas.

Penjelasan teoritis mengenai keterlibatan pemerintah dalam perbaikan kondisi pasar yang tidak sempurna (ketimpangan) datang dari berbagai pandangan. Teori ini bermula dari faham *Marxists* dan *Muckrakers* (pembuka korupsi). *Capture theory* menekankan bahwa regulasi ekonomi sama sekali terjadi bukan karena permintaan publik tetapi sebagai proses dari usaha kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang menginginkan tercapainya kepentingannya. *Capture theory* dibangun berdasarkan suatu silogisme sebagai berikut :

**perusahaan besar—kapitalis—kendali atas institusi dalam masyarakat**

Silogisme tersebut menurut Posner (1974) sepenuhnya salah karena mengabaikan kenyataan bahwa terdapat pengaruh dari perusahaan kecil dan kelompok non bisnis yang juga mempengaruhi pemberlakuan suatu regulasi.

Posner (1974) menyatakan versi yang lebih menarik mengenai *capture theory* berasal dari pemikiran ilmuwan-ilmuwan politik yang menekankan pentingnya keberadaan kelompok-kelompok kepentingan dalam proses legislatif dan administratif. Kelemahan dari versi ini adalah tidak adanya dukungan teori yang cukup. Versi ini tidak mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu industri mampu secara efektif menguasai lembaga politik. Konsep yang diajukan dalam versi ini juga tidak mampu menjelaskan ketika terjadi konflik kepentingan dalam suatu regulasi tunggal yang berdampak terhadap lebih dari satu industri.

Posner (1974) menyebutkan bahwa negara dengan kekuatan dan perlengkapan yang dimilikinya mampu mempengaruhi setiap industry di dalam masyarakat. Negara mempunyai sumber daya yang tidak dimiliki oleh setiap anggota masyarakat manapun yaitu : kemampuan untuk memaksakan peraturan. Negara (pemerintah) dapat memperoleh uang dengan metode yang hanya dapat dijalankan oleh pemerintah dan tidak dapat dijalankan oleh pelaku ekonomi lainnya seperti pemungutan pajak

Posner (1974) mengemukakan bahwa suatu regulasi diterbitkan untuk memenuhi kepentingan pihak mana saja yang memandang regulasi tersebut mempunyai nilai manfaat bagi mereka. Pendapat tersebut didasarkan pada pandangan bahwa regulasi adalah produk yang selalu disesuaikan pada prinsip dasar permintaan dan penawaran atas faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian individu atau kelompok masyarakat atas regulasi tersebut. Cara pandang ini menempatkan setiap orang berhak untuk mendapatkan nilai tambah dari suatu regulasi tergantung kondisi masing-masing individu. Pandangan ini masih mengakui adanya pihak yang diuntungkan maupun dirugikan oleh suatu regulasi tergantung cara pandang dan kemampuan masing-masing.

Posner (1974) mengemukakan bahwa cara pandang atas regulasi ekonomi yang didasarkan pada dua hal. Pandangan pertama yaitu pemerintah dengan kekuatan untuk memaksa dapat membantu memberikan nilai tambah bagi individu atau kelompok tertentu, regulasi ekonomi dipandang sebagai produk yang penempatannya didasarkan pada prinsip permintaan dan penawaran.

Pandangan kedua berkaitan dengan *theory of cartels*. Posner (1974) memandang penerbitan suatu kebijakan identik dengan pembentukan kartel. Mengacu pada *theory of cartels*, penerbitan regulasi seperti halnya pembentukan kartels akan memunculkan biaya yang dapat terjadi karena dua hal. Pertama, biaya yang harus ditanggung oleh pelaku baru yang berusaha menjadi bagian dari suatu kartel. Semakin besar nilai pembentukan kartel maka permintaan akan produk dari industri yang membentuk kartel akan menjadi kurang elastis dan menjadi semakin mahal dan lambat bagi pelaku usaha baru untuk memasuki industri tersebut. Kedua, biaya yang harus ditanggung oleh kartel untuk memaksakan kesepakatan antar anggota kartel agar juga dilaksanakan oleh individu yang bukan menjadi anggota kartel (*free rider*).

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah dapat menunjukkan strategi pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di wilayahnya. Pengeluaran pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik melalui pengeluaran barang modal, barang publik dan pembayaran kepada masyarakat. (Blankenau, Simpson, & Tomijanovich, 2007) menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dengan perkembangan negara maju. (Dao, 2012) mengungkapkan bukti bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita bersifat dependen (bergantung) pada pertumbuhan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan publik, pertumbuhan belanja untuk pendidikan, pertumbuhan populasi, pertumbuhan bagian dari total pengeluaran kesehatan dalam *gross domestic product* dan bagian dari formasi modal kotor dalam *gross domestic product*.

Pada sisi yang lain, fokus pengeluaran pemerintah itu sendiri didasari oleh berbagai pertimbangan seperti kondisi ekonomi di wilayahnya (Creedy, Li, & Moslehi, 2011) maupun pertimbangan politik ekonomi (Plumer & Martin, 2003). Berbagai latar belakang kegiatan pengeluaran pemerintah tersebut didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Latar belakang ekonomi didasari pertimbangan untuk meningkatkan kemakmuran secara umum. Adapun latar belakang ekonomi politik ditujukan untuk mendapatkan dukungan politik yang luas dari kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah.

Latar belakang kondisi ekonomi adalah alasan dasar dari kegiatan pengeluaran pemerintah. Suatu bidang kegiatan ekonomi yang dianggap perlu mendapatkan perhatian yang

lebih serius akan menjadi fokus dalam penentuan pos pengeluaran pemerintah dengan proporsi yang lebih signifikan. (Creedy, Li, & Moslehi, 2011) meneliti mengenai keterkaitan antara kondisi ekonomi suatu sistem pemerintahan dan pilihan-pilihan pada pengeluaran pemerintah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengapa komposisi pengeluaran pemerintah berbeda antar negara demokrasi. (Creedy, Li, & Moslehi, 2011) menemukan bahwa ketidakseimbangan pendapatan menjadi faktor pendorong beragamnya fokus pengeluaran pemerintah dengan kekuatan yang minor. Adapun perbedaan pada pilihan atas barang publik menjadi penentu utama atas fokus pengeluaran pemerintah.

(Plumer & Martin, 2003) mengangkat masalah politik ekonomi dalam penentuan anggaran pengeluaran pemerintah. Model yang dikembangkan dalam penelitian tersebut menggambarkan pengaruh partisipan politik (anggota legislatif) terhadap perilaku pengeluaran belanja pemerintah yang merupakan kombinasi antara *rent* dan barang publik untuk menarik dukungan politik. Manakala tingkat demokrasi masih cukup rendah maka pemerintah cenderung akan memperbesar pengeluaran untuk *rent*. Sebaliknya jika tingkat demokrasi sudah cukup maju maka pemerintah cenderung mengutamakan belanja *barang publik*.

### Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia diluncurkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) dengan tujuan untuk memberikan fokus atas kualitas pengembangan manusia yang tidak hanya berfokus pada aspek pendapatan (Neumayer, 2001). Menurut UNDP manusia merupakan subjek sekaligus sasaran akhir dari kegiatan pembangunan (Anand & Sen, 2000).

Indeks pembangunan manusia terdiri dari tiga dimensi yakni usia harapan hidup, pendidikan dan akses terhadap sumber daya. Sejak tahun 1994 indeks pembangunan manusia diukur dengan formula sebagai berikut :

$$HDI = \frac{1}{3} \sum_{j=i}^3 \left( \frac{X_{ij} - \min F_j}{\max F_j - \min F_j} \right)$$

Keterangan :

*HDI* : *Human development index* (indeks pembangunan manusia)

*X<sub>ij</sub>* : nilai aktual dari komponen *j* untuk negara *i*

*min F<sub>j</sub>* : nilai minimum keempat indikator

*max F<sub>j</sub>*: nilai maksimum keempat indikator

Selain formulasi tersebut (Noorbakhsh, 1998) mengemukakan beberapa teknik pengukuran alternatif yaitu MHDI (*modified human development index*), HDI (*human development index*), MHDIFI.

### Pengendalian Internal

Pengendalian internal dibutuhkan baik dalam sebuah organisasi swasta maupun pada sebuah organisasi pemerintahan. Pengendalian internal menjadi sebuah dasar bagi efektifitas bisnis dan akuntansi dan menjadi dasar dalam kegiatan pemeriksaan. Sebuah sistem pengendalian internal yang efektif memberikan gambaran awal atas pengelolaan organisasi yang baik.

Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dibentuk oleh manajemen puncak suatu organisasi dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang

masuk akal terkait dengan pencapaian tujuan organisasi yang meliputi (1) efisiensi dan efektivitas operasional; (2) keterandalan laporan keuangan; dan (3) kepatuhan pada hukum dan regulasi (Moeler, 2009).

Sistem Pengendalian Intern menurut *The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of The Treadway Commission (1992)* adalah sebagai berikut:

*“Internal control is process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in following categories: Effectiveness and efficiency of operation, reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations.”*

Komponen pengendalian intern menurut COSO adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*).
2. Penilaian Risiko Manajemen (*risk assessment*).
3. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*).
4. Aktivitas Pengendalian (*control activities*).
5. Monitoring.

Kelemahan dan tidak adanya kontrol disebut eksposur (situasi terbuka tanpa perlindungan). Eksposur akan meningkatkan resiko perusahaan akan kerugian keuangan atau kerusakan dari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Suatu kelemahan dalam pengendalian internal dapat mengekspos perusahaan pada satu atau lebih dari jenis-jenis resiko berikut ini: (1). Perusakan aktiva (baik aktiva fisik maupun informasi), (2). Pencurian aktiva, (3). Korupsi informasi atau sistem informasi, dan (4). Kekacauan sistem informasi.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pengeluaran Terhadap Index Pembangunan Manusia**

Peran pemerintah dalam mencampuri proses penyesuaian keseimbangan pasar dalam pembangunan manusia dijelaskan oleh beberapa penelitian (Scully, 2001; Musila & Belassi, 2004). Fan, Hazell, & Sukhadeo (2000) menguraikan beberapa sektor penting yang dapat dijadikan sebagai instrument untuk mengungkit kemakmuran masyarakat desa. Investasi pemerintah pada sector fasilitas transportasi desa dan riset pedesaan merupakan sector yang paling vital karena tidak hanya mempunyai dampak pengentasan kemiskinan yang paling besar juga menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Yang menarik dari penelitian Fan et al (2000) tersebut adalah pembelanjaan pemerintah untuk pendidikan yang mempunyai dampak marginal ketiga tertinggi pada kemiskinan pedesaan dan pertumbuhan produktifitas.

Penelitian (Dao, 2012) membuktikan bahwa pertumbuhan per kapita bergantung pada pertumbuhan pengeluaran pemerintah per kapita untuk sektor kesehatan dan pendidikan, pertumbuhan populasi dan pertumbuhan bagian dari persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dalam GDP. Devereux, Head, & Lapham (2000) mengemukakan penjelasan teoritis mengenai saluran yang dapat digunakan bagi pengeluaran pemerintah untuk mendorong konsumsi dan kemakmuran melalui dampak pengeluaran tersebut terhadap produktifitas agregat, tanpa secara langsung mempengaruhi utilitas maupun kemungkinan produksi. Menurut Devereux et.al (2000) kehadiran persaingan monopolistik dan meningkatkan perolehan (hasil) dari spesialisasi maka pengeluaran pemerintah dapat mengurangi ketidakefisienan (sebagian) karena persaingan monopolistik. Kondisi tersebut terjadi karena pengeluaran pemerintah mampu menghasilkan peningkatan endogen pada total produktifitas dengan cara meningkatkan variabilitas barang-barang *intermediate*. Jika tingkat kembalian

(*return*) dari variabilitas tersebut cukup tinggi, maka munculnya pengeluaran pemerintah yang bersifat pemborosan tersebut dapat meningkatkan tingkat konsumsi pada tingkatan yang mampu mengangkat kemakmuran.

Berdasarkan uraian mengenai keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dan dampak pada kualitas hidup masyarakat tersebut maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

### Efek Moderasi Kelemahan Pengendalian Internal Atas Pengaruh Pengeluaran Terhadap Index Pembangunan Manusia

Menurut (Mauro, 1998) praktek penyuaipan cenderung terjadi pada transaksi atas item yang diproduksi oleh perusahaan yang beroperasi. Proyek-proyek yang bersifat peningkatan kualitas sumber daya manusia cenderung dianggap sebagai proyek yang kurang leluasa untuk dijadikan sebagai ajang korupsi. Menurut Mauro (1995; 1998) anggaran pendidikan dan kesehatan cenderung berkurang karena praktek korupsi karena kegiatan tersebut dianggap tidak terlalu menguntungkan bagi tindak kejahatan korupsi.

Menurut (Akçay, 2006) korupsi berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, investasi asing dan domestik yang tidak berkembang, meningkatnya inflasi, turunnya nilai tukar mata uang, terabaikannya pendidikan dan kesehatan, anggaran militer yang tinggi, meningkatnya ketimpangan pendapatan, angka meningkatnya kematian anak & kemiskinan, dan penerimaan pajak kurang.

Minimalisasi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran dilakukan melalui penciptaan lingkungan pengendalian yang efektif, pengukuran risiko, pelaksanaan aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan yang efektif. Lingkungan pengendalian diciptakan melalui internalisasi nilai-nilai yang dianggap baik kemudian dijadikan sebagai ritual dan pandangan organisasi yang berlaku secara menyeluruh. Ketika setiap individu anggota organisasi mempunyai kesepakatan bahwa penyimpangan, korupsi, penggelapan dan penipuan merupakan tindakan yang harus dihindari maka pengendalian akan menjadi lebih mudah.

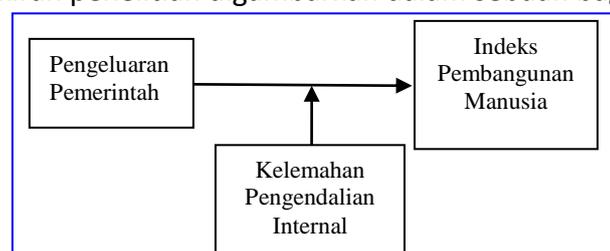
Komponen pengendalian internal yaitu aktifitas pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa efektifitas pengendalian dapat dicapai melalui pelaksanaan prosedur prosedur tertentu. Aktifitas pengendalian dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur, pemisahan tugas secara disiplin, pengendalian fisik atas aset, pengolahan informasi yang efektif dan pengawasan langsung oleh manajemen tingkat atas.

Berdasarkan uraian mengenai keterkaitan antara pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia dan korupsi maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Kelemahan pengendalian internal memoderasi hubungan positif antara pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

### Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Sumber : Data diolah (2014)

## Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

### METODE PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan melakukan pengujian terhadap semua variabel yang diteliti (*causal research*). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara *crosssectional* yaitu melibatkan suatu waktu tertentu dengan banyak sampel yang hasilnya hanya dapat digunakan sekali dalam suatu periode pengamatan.

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemerintahan Kabupaten/Kota se provinsi Banten tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Terdapat 8 (delapan) pemerintahan Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan atas sampel yang diambil dari keseluruhan populasi. Penentuan periode pengamatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 didasarkan pada fakta bahwa pada tahun 2008 dan sebelumnya jumlah pemerintahan Kabupaten/Kota di provinsi banten tidak sama dengan periode sebelumnya. Selanjutnya laporan realisasi anggaran tahun 2013 belum diterbitkan sehingga tahun 2013 dikeluarkan dari objek penelitian.

#### Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu :variabel Pengeluaran Pemerintah, variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Variabel Moderasi. Berikut ini uraian mengenai variabel-variabel tersebut:

##### Variabel Pengeluaran Pemerintah

Variabel ini merupakan variabel dengan skala pengukuran rasio yang diukur dengan menggunakan dua dimensi yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembelanjaan (Expenditure-EXPDTR) dan pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan (Financing-FINC). Variabel pengeluaran pemerintah didapatkan dari laporan realisasi anggaran yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik.

##### Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Variabel ini merupakan variabel dengan skala pengukuran rasio yang diukur dengan menggunakan ukuran nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik.

##### Variabel Pengendalian Internal

Variabel Pengendalian Internal merupakan variabel dengan skala pengukuran rasio yang diukur berdasarkan salah satu dimensi tujuan pengendalian internal yaitu Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang Undangan. Dimensi ini diukur dalam satuan nilai rupiah atas kasus-kasus temuan ketidakpatuhan kepada peraturan perundang-undangan masing-masing pemerintahan kabupaten/kota di provisini Banten berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan.

Masukkan tabel 3.1. disini

### Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

## ANALISIS DATA

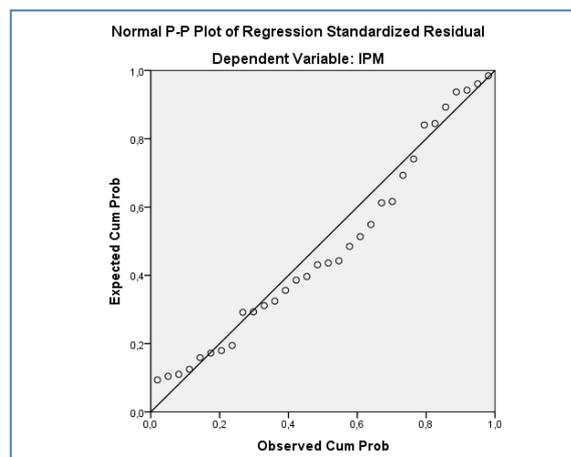
### Statistik Deskriptif

Data penelitian didapatkan dari laporan Biro Pusat Statistik dan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Data yang dianalisis hanya meliputi data empat tahun karena terdapat perbedaan data pada tahun 2008 yakni dalam hal jumlah Kabupaten dan Kota yang tidak sama dengan empat periode sesudahnya. Selanjutnya laporan terakhir yang bisa didapatkan hanya sampai dengan tahun 2012 karena laporan Biro Pusat Statistik mengenai Indeks Pembangunan manusia maupun laporan Badan Pemeriksa Keuangan atas realisasi anggaran pemerintah Kabupaten dan Kota tahun 2013 belum diterbitkan.

Masukkan tabel 4.1. disini

### Uji Normalitas

Deteksi normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik *normal plot* dan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dianggap normal jika grafik normal plot menyebar di sekitar garis diagonal dan mendekati garis tersebut. Tampilan grafik normal plot pada gambar 4.1 menunjukkan bukti bahwa data terdistribusi secara normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : Data diolah (2014)

**Gambar 4.1 Normal P Plot**

Pengujian normalitas juga dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov Test* atas nilai residual model regresi. Hasil *Kolmogorov Smirnov Test* disajikan dalam Tabel 4.1. berikut ini.

**Masukkan tabel 4.1. disini**

Tabel 4.3. menunjukkan nilai *Sig Unstandardized Residual* sebesar 0,719. Nilai *Sig* di atas nilai 0,05 yang menunjukkan nilai *Unstandardized Residual* tidak terdistribusi secara normal dan data terdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Gejala multikolinieritas dideteksi melalui nilai *variance inflation factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Nilai batas yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai *variance inflation factor* > 10. Hasil pengujian multikolinieritas pada model regresi yang dibangun disajikan dalam tabel 4.2.

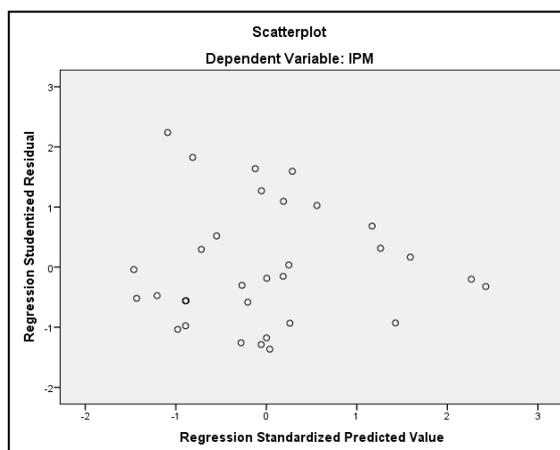
**Masukkan tabel 4.2. disini**

Tabel 4.2 menunjukkan nilai *VIF* atas semua variabel penjelas dari manajemen laba menunjukkan nilai di bawah 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada model regresi yang dibangun. Terdapat satu variabel yang tidak dianggap sebagai predictor yaitu EXPDT-TOT (*total expenditure*).

### Uji Heterokedstisitas

Uji heterokedstisitas dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu *ZPRED* dengan residualnya yaitu *SRESID*. Deteksi ada tidaknya gejala heterokedstisitas dapat dilihat dari ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *ZPRED* (sumbu Y) dan *SRESID* (sumbu X) dilihat dari dua dasar analisis sebagai berikut:

1. Grafik *scatterplot* menunjukkan tidak adanya titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedstisitas.
2. Tidak adanya pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedstisitas.



Sumber : Data diolah (2014)

**Gambar 4.2. Scatter Plot**

Grafik *scatterplot* diatas tidak menunjukkan adanya pola tertentu dan titik-titik dalam grafik menyebar dengan baik diatas dan di bawah titik nol pada sumbu Y. Grafik *scatterplot* menunjukkan model regresi yang dibangun terbebas dari gejala heteroskedastisitas sehingga analisis dapat dilanjutkan.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ditujukan untuk membuktikan bahwa dalam model regresi yang dibangun tidak terdapat korelasi antar anggota pengamatan yang diurutkan dalam waktu seperti dalam data *time-series* atau jarak seperti dalam data *crosssectional* (Gujarati 2003). Model regresi yang bebas dari gejala autokorelasi dapat diartikan bahwa suatu observasi ke observasi yang lainnya telah bebas dari residual atau kesalahan pengganggu (Ghozali 2006). Deteksi adanya autokorelasi dilakukan dengan melaksanakan *Durbin Watson Test*.

**Masukkan tabel 4.3. disini**

Nilai *Durbin Watson Test* sebesar 1.473 yang berada di atas nilai batas atas (du) 1.428 dan lebih kecil dari  $4 - 1.428$  ( $4 - du$ ) menurut tabel *Durbin Watson* untuk tingkat signifikansi 0.05, jumlah variabel bebas  $t = 4$  ( $k = 34$ ) dan jumlah sampel sebanyak 32. Nilai *Durbin Watson Test* tersebut mengindikasikan tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi yang dibangun.

### Analisis Regresi

#### Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai signifikansi F test yang berada lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel bebas secara keseluruhan mampu menjadi prediktor dari variabel terikat. Berikut ini hasil pengujian *F-Test*:

**Masukkan tabel 4.4. disini**

Hasil pengujian *F-test* menunjukkan nilai F sebesar 4,175 signifikan pada 0,015. Nilai signifikansi 0,015 dibawah nilai signifikansi 0,05 yang menunjukkan variabel bebas mampu menjadi prediktor atas variasi dari variabel terikat.

### Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh model yang dibangun mampu menerangkan variasi variabel terikat. Nilai yang digunakan dalam penelitian ini adalah *adjusted R<sup>2</sup>*. Keunggulan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dari nilai *R<sup>2</sup>* adalah tidak adanya pengaruh dari penambahan variabel terhadap nilai yang dihasilkan.

Hasil pengujian regresi menunjukkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,235 yang menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat dan penjelasan sebesar 0,765 dijelaskan oleh faktor lain. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang kecil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain (tingkat investasi, migrasi penduduk dan lainnya) yang diduga mempunyai kemampuan yang lebih kuat dalam menjelaskan praktek manajemen laba.

### Uji t

Uji t dilakukan untuk membuktikan hipotesis secara parsial atas masing-masing variabel bebas. Uji t dilakukan dengan mengukur nilai koefisien, nilai t dan signifikansinya atas masing-masing variabel bebas. Tingkat signifikansi nilai t masing-masing variabel bebas yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan variabel tersebut mampu menjadi penjelas atas variasi variabel terikat. Hasil uji t pada model regresi disajikan dalam tabel 4.9 digunakan untuk pembuktian hipotesis 1a dan hipotesis 2a.

**Masukkan tabel 4.5. disini**

### Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis yang pertama dengan menggunakan teknik analisis regresi dilakukan untuk pembuktian hipotesis yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pengembangan Manusia. Pengujian dilakukan atas persamaan regresi model 1 sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + \beta_1 EXPDTR + \beta_2 FNC + \beta_3 CMPLN-CASE + e$$

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai  $\beta$  variabel EXPDTR (Pengeluaran Belanja Pemerintah) sebesar -0,649 dengan nilai signifikansi t sebesar 0,20. Nilai signifikansi t di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel EXPDTR berpengaruh negatif terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Selain itu nilai koefisien  $\beta$  variabel FNC (Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah) sebesar 0,863 dengan nilai signifikansi t sebesar 0,003 (di bawah nilai signifikansi 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel FNC (Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah) berpengaruh positif terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut maka penelitian ini menerima hipotesis 1 yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

### Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis yang kedua yang menyatakan bahwa kelemahan pengendalian internal memoderasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pengembangan manusia dilakukan dengan menyertakan variabel moderasi (MODERATE 1 & MODERATE 2). Pengujian dilakukan atas persamaan regresi model 2 dan model 3 sebagai berikut :

#### Model 2

$$IPM = \alpha + \beta_1 EXPDTR + \beta_2 FNC + \beta_3 CMPLN-CASE + \beta_4 MODERATE1 + e$$

$$IPM = \alpha + \beta_1 EXPDTR + \beta_2 FNC + \beta_3 CMPLN-CASE + \beta_5 MODERATE2 + e$$

Variabel MODERATE1 adalah interaksi antara variabel EXPDTR (Pengeluaran Belanja Pemerintah) dengan variabel CMPLNCASE (Nilai Kasus Ketidapatuhan Terhadap Undang-Undang) atau dapat dinotasikan EXPDTR\*CMPLNCASE. Hasil analisis regresi atas dengan menyertakan variabel MODERATE1 dalam model regresi menunjukkan bahwa variabel MODERATE1 tidak terbukti berpengaruh terhadap IPM. Nilai signifikansi t sebesar 0,779 berada di atas nilai 0,05 sebagai berikut:

**Masukkan tabel 4.6. disini**

Pengujian selanjutnya menyertakan variabel MODERATE2 yang merupakan interaksi antara variabel FNC (Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah) dengan variabel CMPLNCASE (Nilai Kasus Ketidapatuhan Terhadap Undang-Undang) atau dapat dinotasikan FNC\*CMPLNCASE.

Hasil analisis regresi dengan menyertakan variabel MODERATE2 dalam model disajikan sebagai berikut:

**Masukkan tabel 4.7. disini**

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel MODERATE2 tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap IPM. Nilai signifikansi  $t$  sebesar 0,922 berada di atas nilai 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa kelemahan pengendalian internal memoderasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian ini justru menemukan bahwa kelemahan pengendalian internal yang diukur dengan nilai rupiah dari kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berperan sebagai variabel bebas yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Temuan tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian model 1 yang menunjukkan nilai  $\beta$  sebesar -0,334 dengan tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,049. Nilai signifikansi  $t$  berada dibawah 0,05 yang mengindikasikan bahwa variabel kelemahan pengendalian intern berpengaruh negatif (nilai koefisien  $\beta$  negatif) terhadap indeks pembangunan manusia.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil analisis membuktikan bahwa hipotesis ini dapat diterima yang mengindikasikan bahwa peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan (diproksikan dengan indeks pembangunan manusia) masyarakat sangat penting. Meskipun demikian jika ditelusuri lebih lanjut maka dapat ditemukan adanya kejanggalan atas pola keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Komponen pengeluaran pemerintah yang terbukti berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut adalah pengeluaran untuk pembiayaan dan sebaliknya pengeluaran untuk belanja justru berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

Temuan ini mengindikasikan bahwa aliran dana pengeluaran pemerintah untuk komponen belanja tidak dapat terkait dengan kegiatan perekonomian masyarakat sehingga justru berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat komponen kegiatan belanja modal yang terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana untuk kegiatan ekonomi masyarakat akan tetapi pengeluaran pemerintah untuk belanja lebih mengarah pada kegiatan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa aliran dana pengeluaran pemerintah untuk komponen pembiayaan dapat terserap dalam kegiatan perekonomian masyarakat sehingga mampu menggerakkan kekuatan ekonomi masyarakat. Selain itu data menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan yang cukup besar terhadap keseluruhan pengeluaran pemerintah (rata-rata sebesar 14,04%).

**Masukkan tabel 4.8. disini**

### **Kelemahan Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kelemahan pengendalian internal memoderasi pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil analisis membuktikan bahwa hipotesis ini tidak dapat dibuktikan berdasarkan data yang dianalisis. Hasil analisis tersebut juga menemukan bahwa kelemahan pengendalian internal yang diproksikan dengan nilai rupiah atas kasus ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan justru berlaku sebagai variabel bebas yang berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Temuan ini mengindikasikan bahwa peranan kelemahan pengendalian internal tersebut cukup penting untuk diperhatikan karena bukan lagi sebagai faktor tambahan yang melemahkan efektifitas penggunaan anggaran dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia. Temuan ini sejalan dengan penjelasan teoritis mengenai tujuan diselenggarakannya pengendalian internal. Salah satu tujuan pengendalian internal adalah untuk menjamin dipatuhinya peraturan yang berlaku dengan tujuan akhir untuk mencapai efektifitas dan efisiensi operasi.

Peran sebagai variabel bebas signifikan mengindikasikan bahwa kelemahan pengendalian internal menjadi salah satu penentu (faktor) atas efektifitas dan efisiensi operasi sebuah organisasi. Arah pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh variabel pengendalian internal ini berimplikasi pada urgensi untuk melakukan reduksi bahkan eliminasi atas keberadaan variabel tersebut. Pengendalian internal yang lemah dapat mengarah pada ketidak efektifan dan ketidak efisienan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang tidak memberikan manfaat yang maksimal.

Terkait dengan pelaksanaan anggaran daerah, kelemahan dalam pengendalian internal dapat mengakibatkan perilaku *disfunctional* yang dimulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaannya. *Discretionary* yang kuat atas para pemangku penyusunan anggaran dapat memberikan dorongan bagi penentuan arah kebijakan yang tertuang dalam anggaran untuk kegiatan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat banyak. Demikian pula kelemahan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan dapat mengarah pada pemborosan dan penyalahgunaan penggunaan anggaran.

## SIMPULAN DAN SARAN & IMPLIKASI

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat dihasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap indeks pmbangunan manusia. Pengaruh tersebut dapat lebih diperinci untuk pengeluaran pembelanjaan (*expenditure*) berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia dan pengeluaran pembiayaan (*financing*) berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Kelemahan pengendalian internal yang diproksikan dengan nilai rupiah dari kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dibuktikan memberikan efek moderasi atas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pmbangunan manusia. Kelemahan pengendalian internal tersebut justru menunjukkan peran sebagai variabel bebas sehingga keberadaannya menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan.

### Saran dan Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktik bagi pemerintah Kabupaten/Kota di propinsi Banten dalam aspek penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa pengeluaran belanja berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia dapat memberikan sinyal awal adanya ketidak efektifan pos-pos pengeluaran belanja. Pada mulanya pos-pos pengeluaran belanja justru diharapkan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam pos-pos pengeluaran belanja terdapat salah satu item yaitu pos pengeluaran belanja modal yang terkait dengan pengadaan sarana bagi masyarakat umum yang seharusnya mampu menggerakkan kegiatan ekonomi dan kualitas pengembangan manusia. Pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh pos pengeluaran belanja juga dapat menjadi sinyal mengenai perlunya penataan ulang komposisi anggaran yang mencerminkan keberpihakan pada kepentingan pembangunan masyarakat secara luas. Hasil ini juga memberikan sinyal mengenai pentingnya pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif atas pelaksanaan pos pengeluaran belanja.

Penelitian ini masih mengandung banyak kelemahan terutama yang berkaitan dengan kedalaman analisis yang masih menyisakan dugaan atas faktor faktor lain yang dianggap mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam pencapaian indeks pembangunan manusia yang lebih baik. Kelemahan tersebut menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan analisis yang melibatkan faktor-faktor di luar peranan pemerintah. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor investasi dan migrasi penduduk sebagai faktor yang mampu mempengaruhi indeks pembangunan manusia,

### REFERENSI

- Akçay, S. (2006). Corruption and Human Development. *Cato Journal*, Vol. 26 (1) : 29-49.
- Amponsah, E. N. (t.thn.). Public Spending and Economic Growth: Evidence from Ghana. *Development Southern Africa*, Vol. 26 (3) : 477-499.
- Anand, S., & Sen, A. (2000). The Income Component of The Human Development Index. *Journal of Human Development*, Vol.1 (1): 83-106.
- Blankenau, W. F., Simpson, N. B., & Tomijanovich, M. (2007). Public Education Expenditure, Taxation, and Growth: Linking Data to Theory. *AEA PAPERS AND PROCEEDING*, (hal. 393-398).
- Creedy, J., Li, M. S., & Moslehi, S. (2011). The Government Expenditure: Economic Condition and Preference. *Economic Inquiry*, Vol.49. No. 1 : 94-107.
- Dao, M. Q. (2012). Government Expenditure and Growth in Developing Countries. *Progress in Development Studies*, Vol. 12 (1) : 77-82.
- Devereux, M. B., Head, A. C., & Lapham, B. (2000). Government spending and Welfare with Return to specialization. *Scandinavian Journal of Economics*, Vol 102 (4):547-561.
- Downs, A. (NY). *An Economic Theory of Democracy*. Boston: Addison Wesley.
- Fan, S., Hazell, P., & Sukhadeo, T. (2000). Government Spending, Growth and Poverty in Rural India. *American Journal Agriculture Economics*, Vol 82 (4) 1038-1051.
- Khalifa, Y., & Al-Yousif, Y. K. (2008). Education Expenditure and Economic Growth: Some Empirical Evidence from the GCC Countries. *The Journal of Developing Areas*, Vol. 42 (1) :69-80.

- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110 (August) :681-712.
- Mauro, P. (1998). Corruption and the Composition of government Expenditure. *Journal of Public Economics*, Vol 69: 263-279.
- Moeler, R. (2009). *Brink's Modern Internal Auditing, A Common Body of Knowledge*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Musila, J. W., & Belassi, W. (2004). The Impact of Eduaction Expenditures on Economic Growth in Uganda : Evidence from Time Series Data. *The Journal of Developing Areas*, Vol 38 (1):123-133.
- Musila, J. W., & Belassi, W. (2004). The Impact of Education Expenditure on Economic Growth in Uganda : Evidence from Time Series Data. *The Journal of Developing Areas*, Vol. 38 (1):123-133.
- Neumayer, E. (2001). The Human Development Index and Sustainability - a Constructive Proposal. *Ecological Economic*, Vol 39 : 101-114.
- Noorbakhsh, F. (1998). The Human Delopment Index: Some Technical Issues and Alternative Indices. *Journal of International Development*, Vo. 10 : 598-605.
- Oates, W. E. (1968). The Theory of Public finance in Federal System. *The Canadian Journal of Economics*, Vo.1, No.1 : 37-54.
- Oluwatubi, S. O., & Ogunrinola, I. O. (2011). Government Expenditure on Human Capital Development:Implications for Economic Growth in Nigeria. *Journal of Sustainable Development*, Vol. 4 (3):72-80.
- Parisi, F. (2003). Political Coase Theorem. *Public Choice*, Vo. 115, (1/2) :1-36.
- Plumer, T., & Martin, C. W. (2003). Democracy, Government Spending, and Economic Growth: A Political-Economic Explanation of the Barro-Effect. *Public Choice*, Vol. 117, No. 1/2, pp. 27-50.
- Posner, R. A. (1974). Theories of Economic Regulation. *The bell Journal of Economics and Management Science*, Vol 5(2) :335-358.
- Scully, G. W. (2001). Government Expenditure and Quality of Life. *Public Choice*, Vol 108, (1/2 ):123-145.
- ekker, H., & Van Goor, A. R. (2000). chain management and management accounting: A case study of activity-based costing. *International Journal of Logistics, Research and Applications*, 3, 41-52.
- Easterby-Smith, M. (1997). Disciplines of organizational learning: Contributions and critiques. *Human Relations*, 50(9): 1085-1113.
- Ghozali, Imam. (2008). Metode alternatif dengan partial least squire (PLS). Badan penerbit-UNDIP, Semarang.
- Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Vaidyanath, D. (2002). Alliance management asa source of competitive advantage. *Journal of Management*, 28(3),413-446.
- Ittner, C. D., Larcker, D. F., Nagar, V., & Rajan, M. V. (1999). Suppliersselection, monitoring practices, and firm performance. *Journal of Accounting and Public Policy*, 18, 253-281.
- Kajuter, P., & Kulmala, H. I. (2005). Open book accounting in networks: Potential achievements and reasons for failures. *Management Accounting Research*, 16, 179-204.

- Moller, Windolph & Isbruch. F (2011). The effect of relational factors on open-book accounting and inter-organizational cost management in buyer – supplier partnerships: *Journal of Purchasing & Supply Management*, 17, 121–131.
- Mouritsen, J., Hansen, A., & Hansen, C. (2001). Inter-organizational controls and organizational competencies: Episodes around target cost management/functional analysis and open book accounting. *Management Accounting Research*, 12, 221-244.
- Mentzer, J. T., Min, S., & Zacharia, Z. G. (2000). nature of interfirm partnering in supply chain management. *Journal of Retailing*, 76, 549–568.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Tu, Q., Vonderembse, M. A., Ragu-Nathan, T. S., & Sharkey, T. W. (2006). Absorptive capacity: Enhancing the assimilation of time-based manufacturing practices. *Journal of Operations Management*, 24(5), 692-710.
- Uddin, & Hassan, R (2011). Conceptual Framework of Interorganizational Cost Management: a Critical Analysis. *ASA University Review*, 5, 2.
- Van der Meer-Kooistra, J., & Vosselman, E. (2000). Management control of interfirm transactional relationships: The case of industrial renovation and maintenance. *Accounting, Organizations and Society*, 25, 51–77.
- Vickery, S. K., Jayaram, J., Droge, C., & Calatone, R. (2003). The effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: An analysis of direct versus indirect relationships. *Journal of Operations management*, 21, 523–539.
- Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. *Academy of Management Review*, 27, 185-203.
- Windolph, & Moeller (2012) Open-book accounting: Reason for failure of inter-firm cooperation: *Management Accounting Research*, 23, 47– 60.



## LAMPIRAN

Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012

Provinsi Banten tahun 2012 kab/kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (persen)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pandeglang	63.95	96.37	6.81	628.41	68.77
Lebak	63.35	94.82	6.25	632.21	67.98
Tangerang	65.90	95.86	8.95	637.80	72.05
Serang	63.88	95.72	7.25	633.72	69.33
Kota Tangerang	68.41	98.41	10.04	645.90	75.44
Kota Cilegon	68.62	98.73	9.68	648.88	75.60
Kota Serang	65.47	96.89	8.01	639.17	71.45
Kota Tang. Sel	68.65	98.19	10.70	645.78	76.01
<b>BANTEN</b>	<b>65.05</b>	<b>96.25</b>	<b>8.41</b>	<b>633.64</b>	<b>70.95</b>

Tabel 4.4. F Test

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	95,352	3	31,784	4,175	,015 <sup>b</sup>
Residual	213,153	28	7,613		
Total	308,505	31			

a. Dependent Variable: IPM  
b. Predictors: (Constant), EXPDTR, CMLPLN1, FNC

Sumber : Data diolah (2014)

Tabel 4.5. T Test Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	72,209	1,166		61,949	,000
1 EXPDTR	-3,588E-009	,000	-,649	-2,473	,020
FNC	1,439E-008	,000	,863	3,273	,003
CMLPLNCASE	-1,001E-007	,000	-,334	-2,058	,049

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : Data diolah (2014)

		kegiatan pembiayaan.	
3	CMLPLN-CASE	Jumlah kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur dari nilai kasus yang terlibat	Skala Rasio
4	<i>Moderating 1</i>	Interaksi variabel EXPDTR*CMLPLN CASE	Skala Rasio
5	<i>Moderating 2</i>	Interaksi variabel FNC*CMLPLN CASE	Skala Rasio

Sumber : Data diolah (2014)

Tabel. 4.2. Uji Multikolinearitas

Panel A			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	FNC	,355	2,819
	CMPLN1	,940	1,064
	EXPDTR	,358	2,794
Panel B : Excluded Variable			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	EXPDT-TOT	,000	.

Sumber : Data diolah (2014)

Tabel 4. 3. Durbin Watson Test

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,556 <sup>a</sup>	,309	,235	2,7591	1,473
a. Predictors: (Constant), EXPDTR, CMPLN1, FNC					
b. Dependent Variable: IPM					

Tabel 4.6. T Test

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	71,924	1,553		46,318	,000
1 EXPDTR	-3,179E-009	,000	-,575	-1,543	,135
FNC	1,367E-008	,000	,820	2,661	,013
C MPLNCASE	-1,212E-007	,000	-,404	-1,358	,186
MODERATE1	2,109E-017	,000	,102	,284	,779

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : Data diolah (2014)

Tabel 4.7. T Test  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	72,141	1,369		52,692	,000
1 EXPDTR	-3,506E-009	,000	-,635	-2,075	,048
FNC	1,433E-008	,000	,860	3,172	,004
C MPLNCASE	-1,062E-007	,000	-,354	-1,340	,191
MODERATE2	4,389E-017	,000	,029	,099	,922

a. Dependent Variable: IPM

Sumber : Data diolah (2014)

Tabel 4.8. Proporsi Pengeluaran Pembiayaan  
Terhadap Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah

Kab/Kot	Th	Proporsi	Kab/Kot	Th	Proporsi
Kabupaten Tangerang	2009	19%	Kabupaten Tangerang	2011	26%
Kota Cilegon	2009	5%	Kota Cilegon	2011	21%
Kota Serang	2009	5%	Kota Serang	2011	8%
Kota Tang Sel	2009	18%	Kota Tang Sel	2011	18%
Kota Tangerang	2009	26%	Kota Tangerang	2011	28%
Lebak	2009	7%	Lebak	2011	8%
Pandeglang	2009	13%	Pandeglang	2011	11%
Serang	2009	17%	Serang	2011	11%
Kabupaten Tangerang	2010	19%	Kabupaten Tangerang	2012	20%
Kota Cilegon	2010	4%	Kota Cilegon	2012	5%
Kota Serang	2010	10%	Kota Serang	2012	6%
Kota Tang Sel	2010	21%	Kota Tang Sel	2012	14%
Kota Tangerang	2010	18%	Kota Tangerang	2012	23%
Lebak	2010	7%	Lebak	2012	9%
Pandeglang	2010	10%	Pandeglang	2012	7%
Serang	2010	17%	Serang	2012	18%

Sumber : Data diolah (2014)





